



# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**  
*Jl. Jenderal Sudirman Km 3 Bangko*

**2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**  
Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Bangko Telp&Fax. (0746) 21511  
**BANGKO**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**  
**NOMOR : 08/TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Keuangan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 ;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
11. Peraturan Pemerinta Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah Kabupaten Merangin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN ;**

- MENETAPKAN :** **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**
- PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 mempunyai tugas dan kewajiban:
1. Menghimpun bahan/masukan sesuai dengan bidang tugasnya dari masing-masing, Sekretariat, Bidang dan UPTD Dinas Peternakan dan Perkebunan serta para pelaku pembangunan Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.
  2. Mengolah dan membuat konsep Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022.
  3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin ;
- KEEMPAT** : Segala Biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : BANGKO  
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2022

KEPALA DINAS,  
  
**KOPRAWI, SP**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630618.198709.1.001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Peternakan dan Perkebunan  
Kabupaten Merangin Tahun 2022.

Nomor : 08c Tahun 2022  
Tanggal : 24 JANUARI 2022

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)  
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	2	3	5
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas	Koordinator	
3	Kepala Bidang Program	Ketua	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda 1	Sekretaris	
5	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
6	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota	
7	Kepala Bidang KUPP	Anggota	
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda 2	Anggota	
10	Kasubag. Umum	Anggota	
11	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota	
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota	
13	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota	

KEPALA DINAS  
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN MERANGIN,

  
**KOPRAWI, SP**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630618.198709.1.001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan Rakhmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan pada waktunya.

Pembangunan bidang Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2018-2023 yang berisi uraian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya Peternakan dan Perkebunan secara berkelanjutan yang memiliki daya saing bagi kesejahteraan masyarakat dalam periode lima tahunan.

Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin tahun 2022 berisi pencapaian target pembangunan Peternakan dan Perkebunan terdiri dari capaian sasaran, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Laporan yang telah kami susun ini adalah merupakan suatu bentuk evaluasi terhadap seberapa besar kinerja yang telah diberikan bagi pembangunan di Kabupaten Merangin. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan dapat memberikan kontribusi pembangunan sub sektor Peternakan dan Perkebunan secara khusus, sehingga tercipta perekonomian yang mampu mengimbangi laju dinamika pembangunan yang terus berkembang.

Demikian penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi semua kepentingan.

Bangka, 13 Februari 2023

KEPALA DINAS,  
  
**KOPRAWI, SP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630618 198709 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Manfaat .....	3
1.4. Landasan Penyusunan .....	3
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin .....	5
1.6. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin .....	6
1.7. Metodologi Penyusunan .....	7
1.8. Sistematika Penyusunan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Perencanaan Strategis .....	10
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
3.2. Realisasi Anggaran 2022 .....	33
3.3. Penerimaan Pendapatan Dinas .....	36
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
4.1. Kesimpulan .....	38
4.2. Rekomendasi .....	39
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan .....	11
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....	13
2.3. Program dan Anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....	13
2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....	14
3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	15
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....	16
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin .....	18
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 .....	21
3.5. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2022 .....	23
3.6. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 .....	24
3.7. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Esselon dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	25
3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....	26
3.9. Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....	28
3.10 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022	29
3.11 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Bidang Penunjang Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....	30
3.12 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Bidang Pembangunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....	30
3.13 Capaian Sub Kegiatan Penunjang Dinas Peternakan dan Perkebunan	31

	<i>Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....</i>	
3.14	<i>Capaian Sub Kegiatan Pembangunan (utama) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....</i>	32
3.15	<i>Target Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....</i>	33
3.16	<i>Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....</i>	34
3.17	<i>Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 .....</i>	36

**DAFTAR GAMBAR**

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan .....	7
3.1. Capaian Produksi Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 .....	16
3.2. Jumlah Produksi Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 .....	17
3.3. Perbandingan Capaian Produksi Peternakan dan Perkebunan .....	20
3.4. Produksi Peternakan dan Perkebunan Berdasarkan Renstra 2019-2023 .....	22
3.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	24
3.6. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022.....	25
3.7. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Tahun 2022.....	26
3.8. Perbandingan Capaian Anggaran dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	27
3.9 Target dan Realisasi Anggaran 2022 .....	34
3.10 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 .....	37

**DAFTAR LAMPIRAN**

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	40

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Demi mewujudkan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan dalam mencapai suatu tujuan diawali dengan adanya perencanaan. Sebagai unit dinas teknis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin berupaya melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 maka berbagai program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (*input, output dan outcome*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban kinerja pemerintahan baik Dinas atau Badan atau organisasi lainnya. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu sub kegiatan/kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dinas.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja (LKj), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, akuntabel dan responsif, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1.2.1. Maksud

Laporan kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran program kegiatan strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin selaku institusi teknis dibidang Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan dan tugas pembantuan.

### 1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari **Input**, **Output** dan **Outcome**. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator makro.

### 1.3. Manfaat

Dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- 1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- 2) Mendorong tumbuhnya instansi pemerintahan yang *accountable*, sehingga mampu bertindak secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 3) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 4) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin secara mendasar diharapkan juga dapat memberikan gambaran terhadap :

- a) **Aspek Akuntabilitas Kinerja**, sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
- b) **Aspek Manajemen Kinerja**, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dan juga sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja pada masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat dicapai secara optimal dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 1.4. Landasan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati.

**1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan perkebunan Kabupaten Merangin**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan dan tugas pembantuan dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;

- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- e. Pengevaluasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantu di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

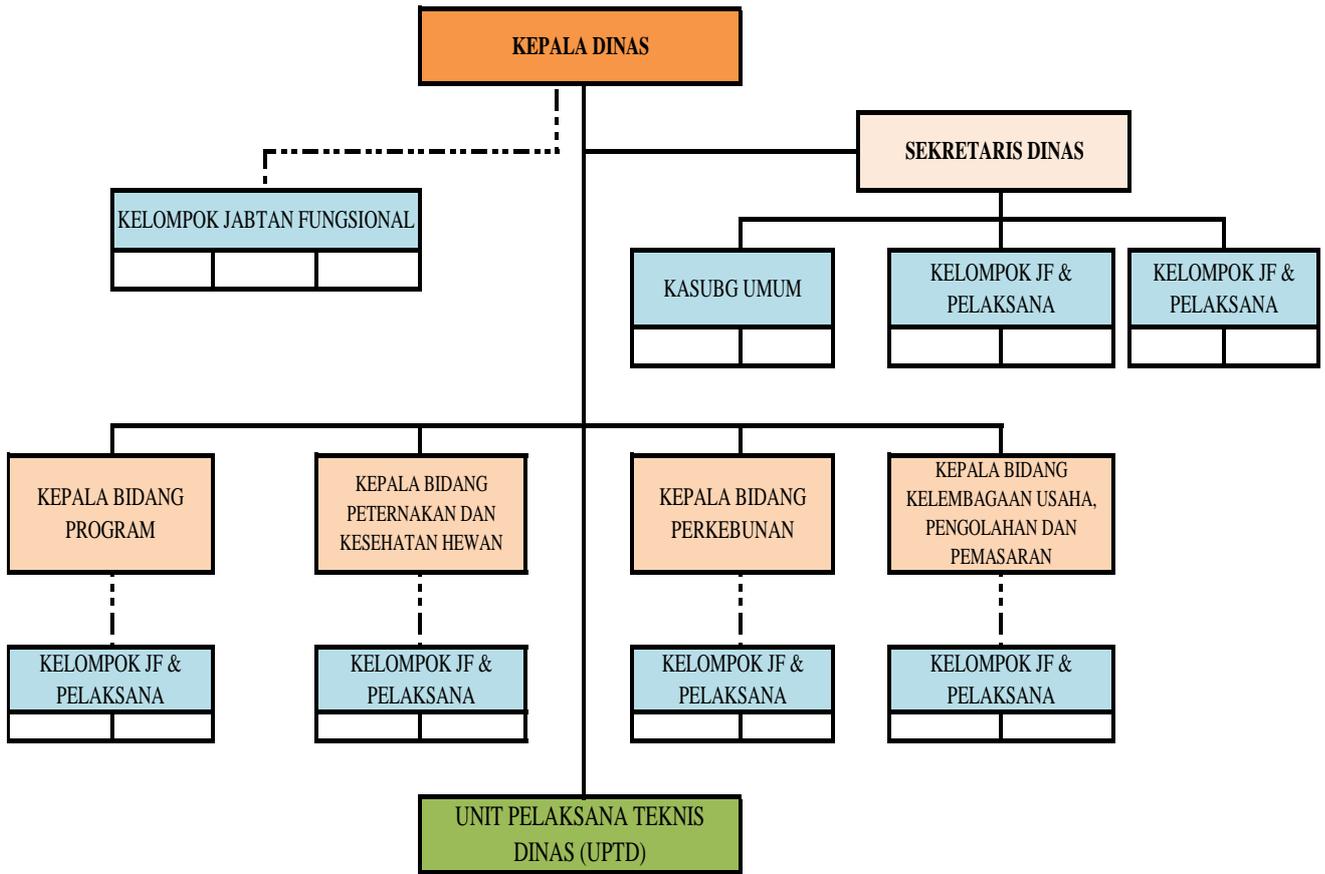
### 1.6. Struktur Organisasi

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana
- 3. Bidang Program, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana
- 4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana
- 5. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana
- 6. Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana
- 7. Jabatan Fungsional

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini :

BAGAN 1  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN



### 1.7. Metodologi Penyusunan

Dalam menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena dengan tepatnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj), akan dapat dihasilkan dokumen yang lebih *accountable*. Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022, pada hakekatnya berasal dari dua sumber, yaitu *pertama*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 dan dokumen-dokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Pembangunan

yang dikelola oleh bagian dan bidang-bidang lingkup Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. *Kedua*, usulan dan masukan dari para pihak yang layak menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan pencapaian kinerja instansi yang lebih *accountable*.

b. Alat analisis

Dari dokumentasi, laporan dan usulan yang disampaikan, selanjutnya dilakukan analisis secara tepat dan akurat untuk menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk mendukung suksesnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022, menggunakan metode analisis pengukuran kinerja yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja (alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu) yang telah ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi ke dalam bentuk persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022.

**1.8. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022, terdiri atas 4 ( empat ) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2022.

Adapun gambaran secara umum susunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Maksud dan Tujuan
- 1.3.Manfaat
- 1.4.Landasan Penyusunan

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

1.6. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

1.7. Metodologi Penyusunan

1.8. Sistematika Penyusunan

## **BAB II. RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

2.1.2. Sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

2.1.3. Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

2.1.4. Program Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja

3.2. Kendala yang dihadapi

3.3. Realisasi Anggaran

## **BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MERANGIN**

**2.1. Perencanaan Strategis**

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 sebagai penjabaran dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin, merupakan pedoman perencanaan pembangunan Peternakan dan Perkebunan lima tahun melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

**2.1.1. Tujuan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan yaitu merupakan suatu gambaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Adapun tujuan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin adalah pada tabel 2.1. di bawah ini.

**2.1.2. Sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi secara periodik dalam bentuk kuantitatif dan telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin adalah pada tabel 2.1.

**2.1.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin**

Strategi dan Kebijakan merupakan suatu perwujudan dari tujuan dan sasaran sebagai pedoman bagi suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur perencana daerah. Adapun strategi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin tertera pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
<b>Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”</b>				
<b>Misi Ke I</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategis</b>	<b>Kebijakan</b>
Mengembangkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya bidang pertanian dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Membangun sentra-produksi peternakan dan perkebunan.</li> <li>o Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub sektor peternakan dan perkebunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan</li> </ul>	
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan

#### **2.1.4. Program Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan ditempuh institusi. Karena itu, program merupakan titik awal pengaktualisasikan rencana dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara terpadu oleh suatu instansi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana program SKPD yang ditetapkan terbagi atas Urusan Program Penunjang, Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, dengan rincian program sebagai berikut :

##### **A. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

##### **B. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian terdiri dari beberapa program yaitu :**

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian;

#### **2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas .....

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 dengan Bupati Merangin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Produksi Peternakan dan Perkebunan	1. Produksi Daging (kg)	2.802.951
		2. Produksi Telur (kg)	816.607
		3. Produksi Kelapa Sawit (Ton)	234.658
		4. Produksi Kopi (Ton)	12.473
		5. Produksi Karet (ton)	87.749,8

Tabel 2.3. Program dan Anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,021,904,827	6,512,811,547
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,528,607,500	1,824,364,500
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,629,566,000	1,182,334,750
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	223,632,376	223,632,376
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	22,617,500	22,617,500
	<b>J U M L A H</b>	<b>13,426,328,203</b>	<b>9,765,760,673</b>

Dari beberapa indikator Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin diatas, maka yang dijadikan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin adalah :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program
1.	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	1. Produksi Daging (Kg) 2. Produksi Telur (Kg) 3. Produksi Kelapa Sawit (ton) 4. Produksi Kopi (Ton) 5. Produksi Karet (Ton)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4. Program Perizinan Usaha Pertanian;

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin diukur berdasarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1. *Skala Nilai Peringkat Kinerja*

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian	Kode
1.	91 ≥	Sangat Tinggi	
2.	76 ≥ 90	Tinggi	
3.	66 ≥ 75	Sedang	
4.	51 ≥ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Adapun capaian indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

.....

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	1 Produksi Daging (Kg)	2.802.951	1.976.642,36	70,52
		2 Produksi Telur (Kg)	816.607	905.081	110,83
		3 Produksi Kelapa Sawit (Ton)	234.658	210.171	89,56
		4 Produksi Kopi (Ton)	12.473	10.772	86,36
		5 Produksi Karet (Ton)	87.749,8	77.959	88,84

• Angka semenatar

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 rata-rata adalah baik, dengan capaian indikator kinerja utama untuk sasaran meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan dengan indikator kinerja yaitu produksi daging dari target sebanyak 2.802.951 kg, realisasi sebanyak 1.976.642,36 ton atau capaian kinerja sebesar 70,52% untuk indikator produksi telur dengan target sebesar 816.607 kg dengan realisasi sebesar 905.081 kg atau sebesar 110,83%.

Sedangkan indikator sub sektor perkebunan dengan capaian indikator kinerja utama rata-rata baik, indikator produksi kelapa sawit dengan target 234.658 ton terealisasi sebesar 210.171 ton atau 89,56%, indikator produksi kopi dengan target 12.473 ton dengan realisasi sebesar 10.772 ton atau sebesar 86,36%, dan untuk indikator produksi karet dengan target sebesar 87.749,8 ton dengan realisasi sebesar 77.959 ton atau sebesar 88,84%.



Gambar.3.1. Capaian Produksi Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tujuh indikator kinerja utama sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Adapun program/ kegiatan pada sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 8) Program Perizinan Usaha Pertanian;



Gambar.3.2. Jumlah Produksi Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022

### 3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan didukung oleh beberapa kegiatan baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang berada di sekretariat dinas. Untuk perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2022 beberapa dengan tahun terakhir dapat dilihat ada tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

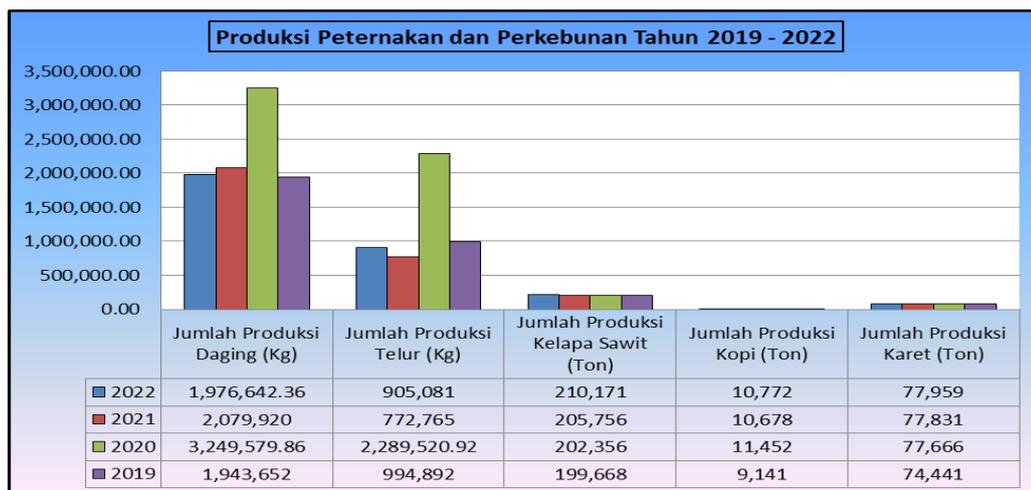
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capain Kinerja (%)				Realisasi Kinerja s/d target akhir resntra	Capain Kinerja Akhir Renstra
			2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019	2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah Produksi Daging (Kg)	12,674,470	2,802,951	2,502,634	2,234,495	1,995,085	1,976,642.36	2,079,920	3,249,579.86	1,943,652	70.52	83.11	145.43	97.42	9,249,794.22	72.98
2	Jumlah Produksi Telur (Kg)	3,818,065	816,607	759,634	706,636	657,336	905,081	772,765	2,289,520.92	994,892	110.83	101.73	324.00	151.35	4,962,258.92	129.97
3	Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	1,120,319	234.658	218,287	215,061	200,056	210,171	205,756	202,356.00	199,668	89.56	94.26	94.09	99.81	817,951.00	73.01
4	Jumlah Produksi Kopi (Ton)	55,423	12,473	11,339	9,371	8,520	10,772	10,678	11,452.00	9,141	86.36	94.17	122.21	107.29	42,043.00	75.86
5	Jumlah Produksi Karet (Ton)	418,852	87,749.8	83,571.30	79,591.70	75,802	77,959	77,831	77,666.00	74,441	88.84	93.13	97.58	98.20	307,897.00	73.51

Melihat tabel di atas jelas bahwa capaian indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dari tahun 2019 sampai tahun 2022 berfluktuasi yaitu ada menunjuk kenaikan dan pula yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk indikator kinerja utama dengan sasaran meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan dengan indikator kinerja utama yaitu produksi daging tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan, dimana capaian kinerja tahun 2022 sebesar 70,52%, sedangkan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 83,11%, capaian kinerja tahun 2020 sebesar 145,43% dan tahun 2019 sebesar 97,420%. Penurunan ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat masih dalam tahap pemulihan setelah terjadinya Covid-19, ditambah lagi dengan terjadinya penularan kasus penyakit ternak seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi dan penyakit menular lainnya yang terjadi 2022 yang menyebabkan konsumsi masyarakat akan daging mengalami penurunan.

Untuk capaian produksi telur tahun 2022 bila dibandingkan beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi ada peningkatan dan ada juga penurunan. Produksi telur tahun 2022 bila dibandingkan tahun 2021 mengalami peningkatan baik tingkat capaian kinerja maupun produksinya, tetapi jika dibandingkan produksi telur tahun 2020 dan tahun 2019, capaian dan produksi telur tahun 2022 lebih rendah, dimana produksi telur tahun 2022 sebesar 905.081 kg dengan capaian sebesar 110,83%, tahun 2021 sebesar 772.765 kg dengan capaian 101,73%, tahun 2020 sebesar 2.289.520,92 kg dengan capaian 324,00%, dan produksi telur tahun 2019 sebesar 994.892 kg dengan capaian 151,35%. Terjadinya peningkatan ini dikarenakan peralihan konsumsi protein masyarakat dari daging ke telur akibat kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan setelah terjadinya pengaruh Covid-19 yang terjadi pada tahun 2021 dan kasus penyakit mulut dan kuku tahun 2022.

Produksi sub sektor bidang perkebunan tahun 2022 bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir rata-rata terjadi kenaikan, namun capaian kinerjanya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja utama produksi kelapa sawit tahun 2022 bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir terjadi penurunan, capaian tahun 2022 sebesar 89,56 %, tahun 2021 sebesar 94,26%, capaian tahun 2020 sebesar 94,09% dan tahun 2019 sebesar 99,81%.

Produksi kopi tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021, dan lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 dan dibanding tahun 2019 terjadi peningkatan, tetapi capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 sebesar 86,36%, tahun 2021 sebesar 94,17%, capaian kinerja tahun 2020 sebesar 122,21% dan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 107,29%. Terjadinya peningkatan produksi untuk tahun 2022 ini dikarena oleh kondisi cuaca yang mendukung dan disertai harga komoditi mengalami kenaikan.



Gambar.3.3. Perbandingan Capaian Produksi Peternakan dan Perkebunan

Sedangkan untuk produksi karet tahun 2022 bila dibandingkan beberapa tahun terakhir terjadi sedikit peningkatan, dengan capaian kinerja yang cenderung menurun, tahun 2022 sebesar 88,84%, tahun 2021 capaian sebesar 93,13%, capaian kinerja tahun 2020 sebesar 97,58% dan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 98,20%.

**3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023**

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tahun ke satu sampai tahun keempat berdasarkan renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan 2018-2023 didukung oleh beberapa kegiatan baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang berada di sekretariat dinas. Untuk realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun keempat berdasarkan renstra 2018-2023 dapat dilihat ada tabel di bawah ini :

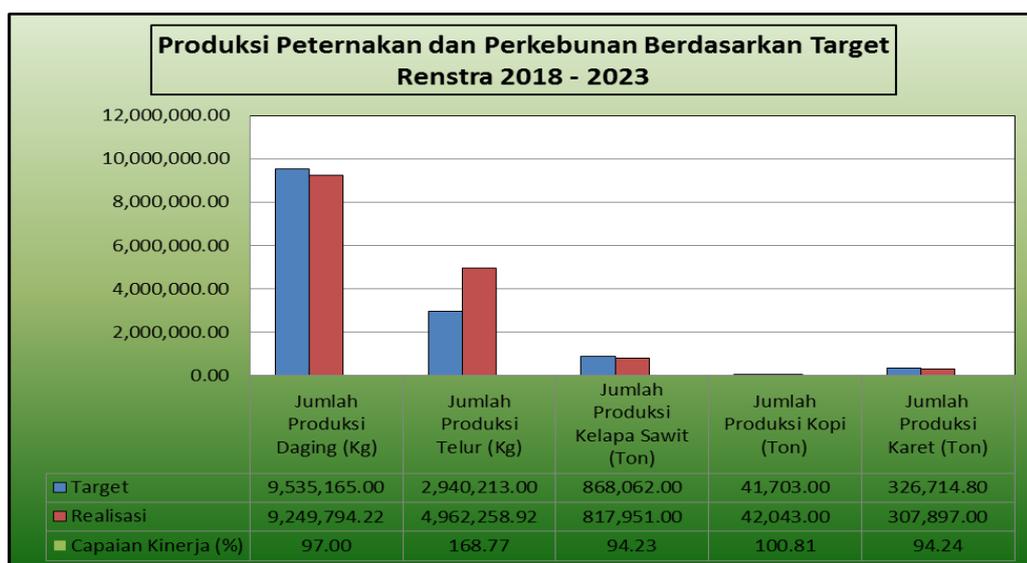
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 dengan Target

*Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023*

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	Jumlah Produksi Daging (Kg)	9,535,165	9,249,794.22	97.00
		Jumlah Produksi Telur (Kg)	2,940,213	4,962,258.92	168.77
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	868,062	817,951	94.23
		Jumlah Produksi Kopi (Ton)	41,703	42,043	100.81
		Jumlah Produksi Karet (Ton)	326,714.8	307,897	94.24

Dari tabel di atas jelas bahwa capaian indikator kinerja utama sampai tahun keempat sudah sangat baik, yang mana capaian kinerjanya rata-rata sudah tercapai dari target Renstra. Untuk sasaran strategis produksi peternakan dan perkebunan dengan indikator kinerja utama yaitu 1) produksi daging dimana target sampai tahun keempat renstra sebesar 9.535.165 kg dengan realisasi sampai akhir tahun 2022 sebesar 9.249.794,22 kg dengan capaian kinerja sebesar 97,00 2) produksi telur dimana target sampai tahun keempat renstra sebesar 2.940.213 kg dengan realisasi sampai akhir tahun 2022 sebesar 4.962.258,92 kg dengan capaian kinerja sampai akhir renstra sebesar 168,77%.

Sasaran Meningkatkan produksi perkebunan dengan indikator kinerja utama yaitu 1) indikator produksi kelapa sawit dimana target sampai tahun keempat renstra sebesar 868.062 ton dengan realisasi sampai tahun 2022 sebesar 817.951 ton dengan capaian kinerja sebesar 94,23%, 2) indikator kinerja produksi kopi dimana target sampai tahun keempat renstra sebesar 41.703 ton dengan realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 42.043 ton dengan capaian kinerja sebesar 100,81%, 3) produksi karet dimana target sampai tahun keempat renstra sebesar 318.651 ton terealisasi sampai tahun 2022 sebesar 326.714,8 ton dengan capaian kinerja sebesar 94,24%



Gambar.3.4. Produksi Peternakan dan Perkebunan Berdasarkan Renstra 2018-2023

### 3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala terkait teknis pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin yang diuraikan sebagai berikut : adapun kendala yang dihadapi yaitu ; 1) Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin tidak mengakomodir semua kebutuhan sesuai yang direncanakan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pada sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi ; 2) Terjadinya pengurangan anggaran pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai akibat dari defisit anggaran Kabupaten Merangin, berakibat adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (dihapus); 3) Keterbatasan jumlah aparatur antara lain pada tingkatan staf pengelola kegiatan dan petugas teknis di lapangan; 4) Pengelolaan perkebunan rakyat yang belum optimal diakibatkan oleh skala usaha bersifat tradisional dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah; 5) Terdapat potensi sumberdaya Peternakan dan Perkebunan yang belum terdata dan perlu dilakukan studi lebih mendalam. 6) Disamping untuk sub sektor perkebunan rakyat bibit yang diguna yang berkualitas rendah, pemupukan yang sangat terbatas dan harga yang cenderung naik, dan cara pemupukan yang kurang tepat, pengendalian gulma yang kadang terabaikan.

Keberhasilan ini disebabkan oleh : 1) disamping permintaan cukup tinggi terutama komoditi daging dan telur juga komoditi ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap keluarga terutama waktu bulan puasa dan hari besar lainnya, 2) untuk komoditi kopi disamping permintaan cukup tinggi

juga luas lahan yang terus bertambah setiap tahun dikarenakan harga yang relatif tinggi sepanjang tahun.

Tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

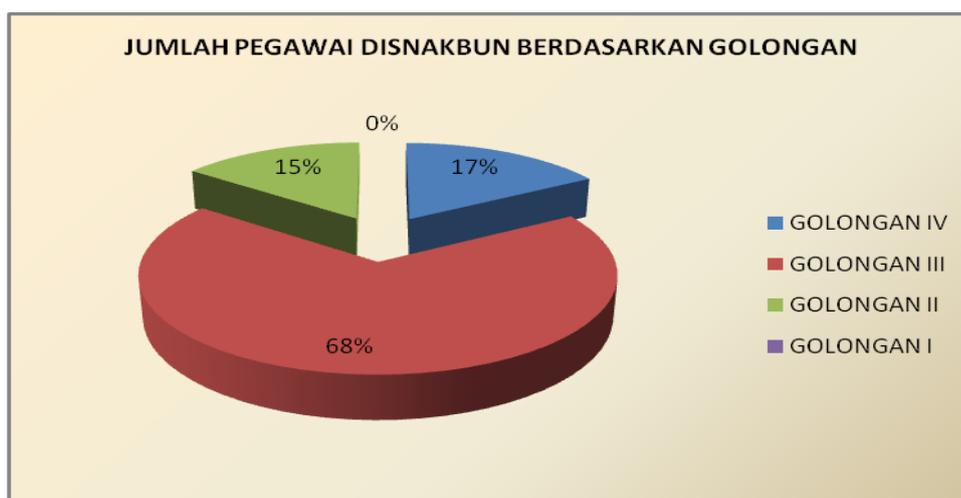
1. Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan bidang Peternakan dan Perkebunan.
2. Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
3. Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha Peternakan dan Perkebunan, terutama perkebunan rakyat.
4. Menambah dan mengurangi program/ kegiatan yang dinilai berpotensi pada percepatan capaian kinerja Renstra/ Renja tahun mendatang;
5. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran.
6. Perlunya dilakukan perencanaan zonasi Peternakan dan Perkebunan guna memetakan potensi Peternakan dan Perkebunan yang belum terdata.
7. Pada tahun mendatang akan dilakukan penganggaran kembali sesuai dengan rencana kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

### **3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin memiliki 54 orang pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap kurang lebih 82 orang, yang terdiri dari 74 orang honorer Daerah dan 8 orang tenaga honorer Provinsi yang ditempatkan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan kabupaten Merangin. Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas Peternakan dan Perkebunan cukup memadai 16,67% merupakan golongan IV, dan 68,52% merupakan golongan III serta selebihnya golongan II sebesar 14,81% dan I sebesar 0,00%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	7	1	1	-	9
2	Golongan III	5	8	8	16	37
3	Golongan II	1	1	1	5	8
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	Honoror Daerah	-	-	-	-	74
6	THL Pusat/Honoror Provinsi	-	-	-	-	8
	<b>TOTAL</b>					<b>136</b>



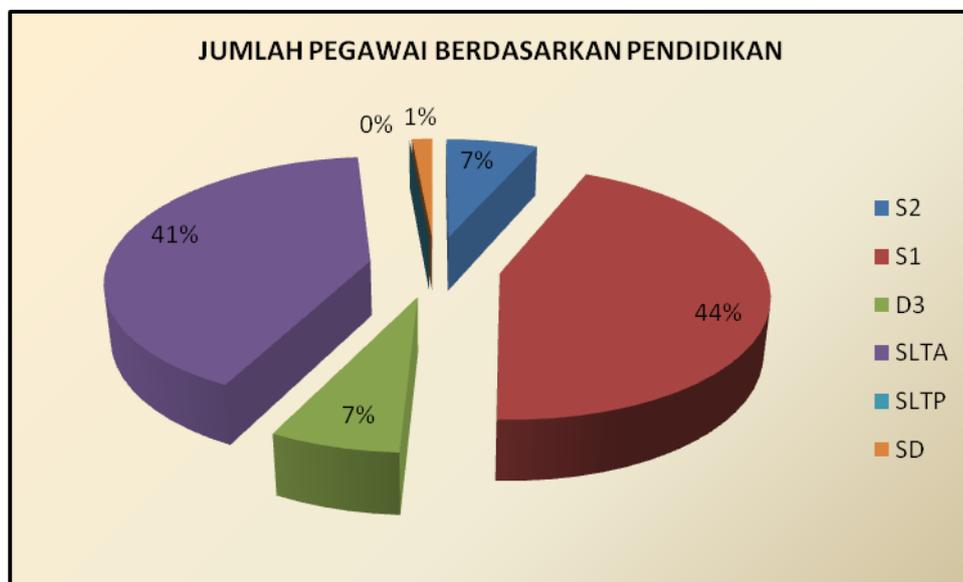
Gambar.3.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022

Menurut tingkat pendidikannya pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan dari total pegawai sebanyak 136 orang, sarjana strata 2 (dua) sebanyak 6,62%, sarjana strata 1 (satu) sebanyak 44,12%, D1 sampai dengan D3 sebanyak 6,62%, SLTA sebanyak 41,17%, dan SLTP /SD sebanyak 1,47%, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah
		PNS	CPNS	Honoror Daerah	THL Pusat/Honoror Prov.	
1	Strata 3	-	-	-	-	-
2	Strata 2	8	-	-	1	9
3	Strata 1	24	-	32	4	60
4	Sarjana Muda /Diplma III	5	-	3	1	9
5	SLTA	16	-	38	2	56
6	SLTP	0	-	0	-	0
7	SD	1	-	1	-	2
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>136</b>

Berdasarkan data kepegawaian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut pendidikannya sumberdaya aparatur cukup memadai yaitu ditunjang dengan 50,73% berpendidikan pasca sarjana, sarjana, tapi bila ditinjau dari jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan sudah cukup memadai baik staf di dinas maupun yang dilapangan, namun kualitas terutama tenaga pegawai tidak tetap sangatlah rendah.



Gambar.3.6. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

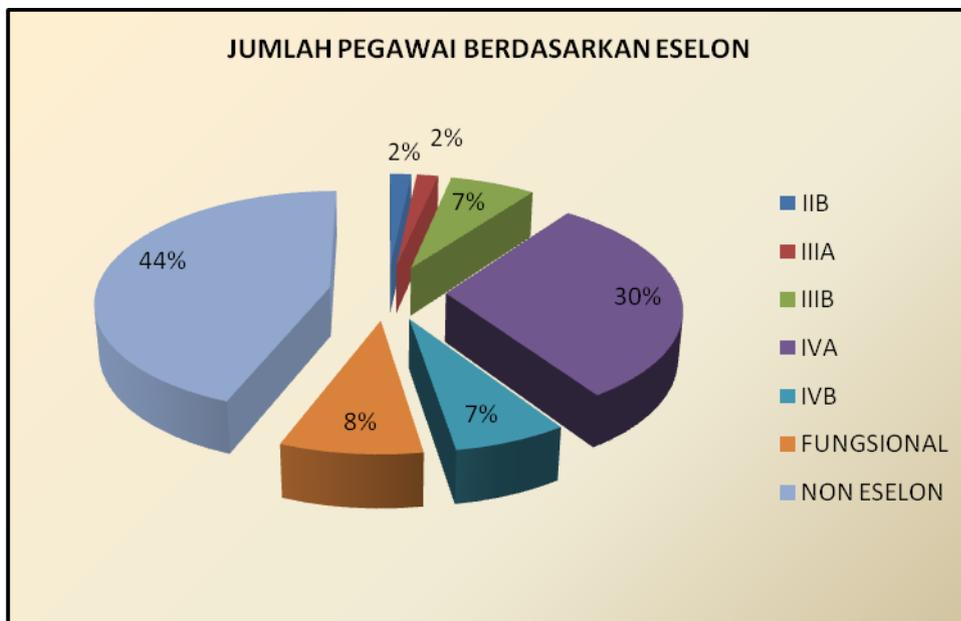
Eselonisasi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin terdiri dari 1 orang eselon II-B, 1 orang eselon III-A, 4 orang eselon III-B, 22 orang eselon IV, 5 orang fungsional dan 26 orang non eselon sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Esselon dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Esselon II	1	-	1
2	Esselon III	5	-	5
3	Esselon IV	14	8	18
4	Fungsional	1	5	5
5	Non Esselon	12	8	26
6	CPNS	0	0	2
	<b>J U M L A H</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>54</b>
7	Honorer Daerah dan THL Pusat/Honorer Provinsi	52	30	82
	<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>51</b>	<b>136</b>

Sumber daya manusia, yaitu jumlah personil Dinas Peternakan dan Perkebunan berjumlah 136 orang terdiri dari 54 ASN dan 74 Honorer Daerah dan 8

orang Tenaga Harian Lepas Pusat/Honoror Provinsi, melihat jumlah tersebut merupakan potensi yang sangat baik dengan luas wilayah Merangin untuk potensi peternakan dan perkebunan yang tersebar seluruh kecamatan dalam kajian rasio jumlah ASN dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi masih belum memadai dengan wilayah yang tersebar di setiap kecamatan.



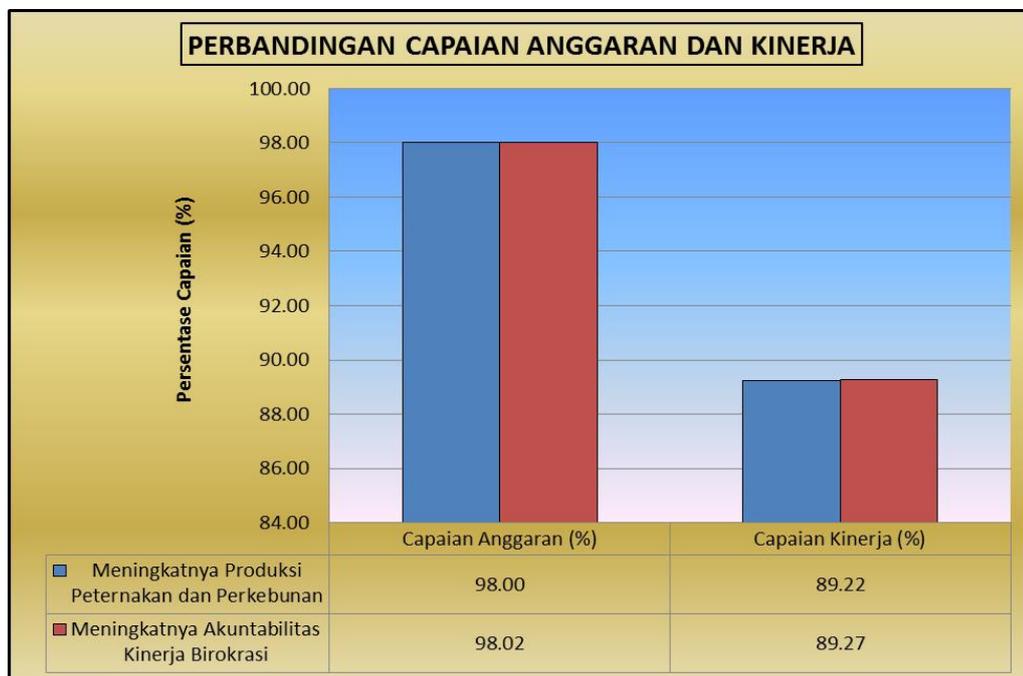
Gambar.3.7. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Tahun 2022

Anggaran belanja langsung pada DPPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 9.765.760.673,- untuk melaksanakan sekitar 28 sub kegiatan, 12 kegiatan dengan program sebanyak 5 program guna mencapai target indikator pada sasaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya produksi peternakandan perkebunan	1. Produksi Daging (kg)	3.252.949.126	3.188.106.718	98,00%	89,22%	Efisien
	2. Produksi Telur (kg)					
	3. Produksi Karet (Ton)					
	4. Produksi Kelapa Sawit (Ton)					
	5. Produksi Kopi (Ton)					
	6. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (%)					
	7. Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) (%)					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Disnabun	6.512.811.547	6.384.179.876	98,02%	89,27%	Efisien

Untuk tingkat efisiensi Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran sudah efisien baik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 98,01% dan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 89,24%.



Gambar.3.8. Perbandingan Capaian Anggaran dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2022 melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya, salah satu langkah yang diambil antara lain :

1. Penyediaan bahan pakai habis kantor, pada tahun 2022 penyediaan bahan pakai habis kantor anggaran sudah sesuai ASB dan difokuskan dalam satu pintu yaitu melalui sekretariat antara lain ATK, cetak ganda khusus untuk bidang kecuali bidang program memiliki ATK dan cetak penggandaan tersendiri.
2. Belanja pemeliharaan tahun 2022 hanya tersedia pemeliharaan alat dan mesin serta pemeliharaan kendaraan dinas.
3. Perjalanan dinas dalam daerah juga dikurangi dari tahun sebelumnya.
4. Penunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan sarana dan peralatan kerja yang tersedia.

**3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pengukuran Capaian kinerja organisasi berikutnya menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

perjanjian kinerja pada sasaran renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Capaian kinerja untuk mencapai target pada perjanjian kinerja Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sebagian besar sudah tercapai seperti tabel 3.2. diatas. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada perjanjian kinerja tahun 2022 dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9. Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Program/Kegiatan	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	1. Produksi Daging (kg)	89,22%	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4. Program Perizinan Usaha Pertanian;		√		
	2. Produksi Telur (kg)						
	3. Produksi Karet (Ton)						
	4. Produksi Kelapa Sawit (Ton)						
	5. Produksi Kopi (Ton)						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Disnabun	89,27%	I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√		
<b>RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN</b>		<b>89,24%</b>		<b>BERHASIL</b>			

Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada Sasaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023 pada tahun ke 4 berhasil walaupun belum mencapai 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatkan produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani dengan empat indikator telah berhasil dengan nilai rata-rata 89,22% melalui sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

4. Program Perizinan Usaha Pertanian;

Dengan indikator sudah tercapai yaitu ; indikator produksi daging, telur, kelapa sawit, kopi dan karet umum sudah tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Disnakhbun tercapai secara maksimal dan berhasil melalui beberapa program dan kegiatan.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran program melalui kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja Pejabat struktural eselon III dapat berhasil dicapai sangat berhasil dengan capaian rata-rata sebesar 89,27%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.10 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Program	Sgt Berhasil	Berhasil	Ckp Berhasil	Tdk berhasil
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi</b>		<b>89,27%</b>		√			
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>89,27%</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		√		
<b>Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan</b>		<b>94,33%</b>		√			
Meningkatkan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Penyediaan Sarana Peternakan 2. Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	<b>100,00%</b>	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	√			
Meningkatkan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan 2. Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	<b>93,33%</b>	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	√			
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit ternak	<b>84,01%</b>	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		√		
Meningkatkan Perizinan Usaha Pertanian	Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	<b>100,00%</b>	Program Perizinan Usaha Pertanian	√			
<b>RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN ESELON III</b>		<b>91,80%</b>		<b>SANGAT BERHASIL</b>			

Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon IV bagian penunjang dapat berhasil dicapai sangat berhasil dengan capaian rata-rata 98,89%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel. 3.11 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Bidang Penunjang Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kegiatan	Sngt Berhsl	Berh sl	Ckp Berh sl	Tdk berh sl
<b>Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>98,89</b>		√			
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100,00%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√			
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√			
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	94,44%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	√			
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√			
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√			
<b>RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN ESELON IV</b>		<b>98,89%</b>		<b>SANGAT BERHASIL</b>			

Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon IV untuk bagian utama (pembangunan) dapat berhasil dicapai sangat berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 97,80%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel. 3.12 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Bidang Utama Pembangunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kegiatan	Sngt Berhsl	Berh sl	Ckp Berh sl	Tdk berh sl
<b>Meningkatnya Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>		<b>97,88%</b>		√			
Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan	100,00%	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	√			
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Peningkatan Produktivitas Kopi Peningkatan Produktivitas Karet Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	70,43%	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			√	
Meningkatnya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Populasi Ternak Sapi Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Unggas	123,21%	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	√			
<b>Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		<b>93,33%</b>		√			
Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan	93,33%	Pembangunan Prasarana Pertanian	√			
<b>Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		<b>100,00%</b>		√			
Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hewan yang dijamin Kesehatan melalui vaksin dan pengobatan dari populasi	100,00%	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	√			
<b>Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian</b>		<b>100,00%</b>		√			
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	100,00%	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	√			
<b>RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN ESELON IV</b>		<b>97,80%</b>		<b>SANGAT BERHASIL</b>			

Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran sub kegiatan baik sub kegiatan penunjang maupun sub kegiatan utama (pembangunan) dapat berhasil dicapai walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target, namun capaian ini berhasil untuk capaian sub kegiatan penunjang dengan capaian sangat berhasil rata-rata sebesar 89,27%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui sub kegiatan penunjang sebagaimana berikut :

Tabel. 3.13 Capaian Sub Kegiatan Penunjang Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kegiatan	Sngt Berhsl	Berh sl	Ckp Berh sl	Tdk berh sl
<b>Meningkatnya Perencanaan, Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>100,00%</b>		√			
Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√			
	Dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah						
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen RKA-SKPD dan RKA Perubahan SKPD	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	√			
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan DPA Perubahan SKPD	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	√			
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√			
Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100,00%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√			
<b>Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100,00%</b>		√			
Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√			
Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikator Keuangan SKPD	100,00%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√			
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√			
<b>Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>93,33%</b>		√			
Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD yang disediakan	66,67%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			√	
Meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100,00%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√			
Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	73,33%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			√	
Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100,00%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√			
Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas kedalam dan keLuar Daerah	126,67%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√			
<b>Meningkatnya Penyediaan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100,00%</b>		√			
Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2022	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100,00%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2022	√			
Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2022	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2022	√			
<b>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>53,00%</b>					√
Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Terlunasi Pajaknya	50,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				√
Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56,00%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				√
<b>RATA-RATA KEBERHASILAN PENUNJANG</b>	<b>PENCAPAIAN SUB KEGIATAN</b>	<b>89,27%</b>		<b>BERHASIL</b>			

Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran sub kegiatan utama (pembangunan) dengan capaian rata-rata sebesar 130,00% dengan katagori sangat

berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini sangat signifikan terutama pada peningkatan vaksinasi ternak. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui sub kegiatan utama (pembangunan) sebagaimana berikut :

Tabel. 3.14 Capaian Sub Kegiatan Pembangunan (utama) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kegiatan	Sngt Berhsl	Berh sl	Ckp Berh sl	Tdk berh sl
<b>Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>		<b>116,67%</b>		√			
Meningkatnya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Peternakan yang diadakan	116,67%	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	√			
	Jumlah Sarana Perkebunan yang diadakan						
	Jumlah Kelompok Tani Tembakau yang Dibina						
<b>Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>54,80%</b>				√	
Meningkatnya Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaana Kebun Pemerintah	54,80%	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman			√	
	Jumlah Bibit tanaman produksi perkebunan yang diadakan						
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>		<b>46,68%</b>				√	
Meningkatnya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang diadakan	80,97%	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		√		
	Jumlah Pakan Ternak yang Diadakan	12,38%					
<b>Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		<b>100,00%</b>		√			
Meningkatnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	100,00%	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	√			
	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan RPH	100,00%					
Meninkatnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Operasional RPH	100,00%	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	√			
	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan Prasarana UPTD Disnakhun Lainnya (Pembibitan Ternak, Puskewan dan Perbibitan Tanaman Perkebunan)						
<b>Meningkatnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</b>		<b>100,00%</b>		√			
<b>Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota</b>		<b>361,86%</b>		√			
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Divaksin dan Pelayanan Kesehatan Ternak	361,86%	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	√			
	Jumlah Perusahaannya						
<b>Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100,00%</b>		√			
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang Dibina, Diawasi dan Dinilai	100,00%	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	√			
	Jumlah Perusahaannya						
<b>RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SUB KEGIATAN UTAMA</b>		<b>130,00%</b>		<b>SANGAT BERHASIL</b>			

### 3.2. Realisasi Anggaran 2022

Anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 setelah perubahan berjumlah sebesar Rp. 9.765.760.673,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dengan rincian anggaran Gaji ASN adalah sebesar Rp.5.577.598.147,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan sisanya belanja pembangunan dan

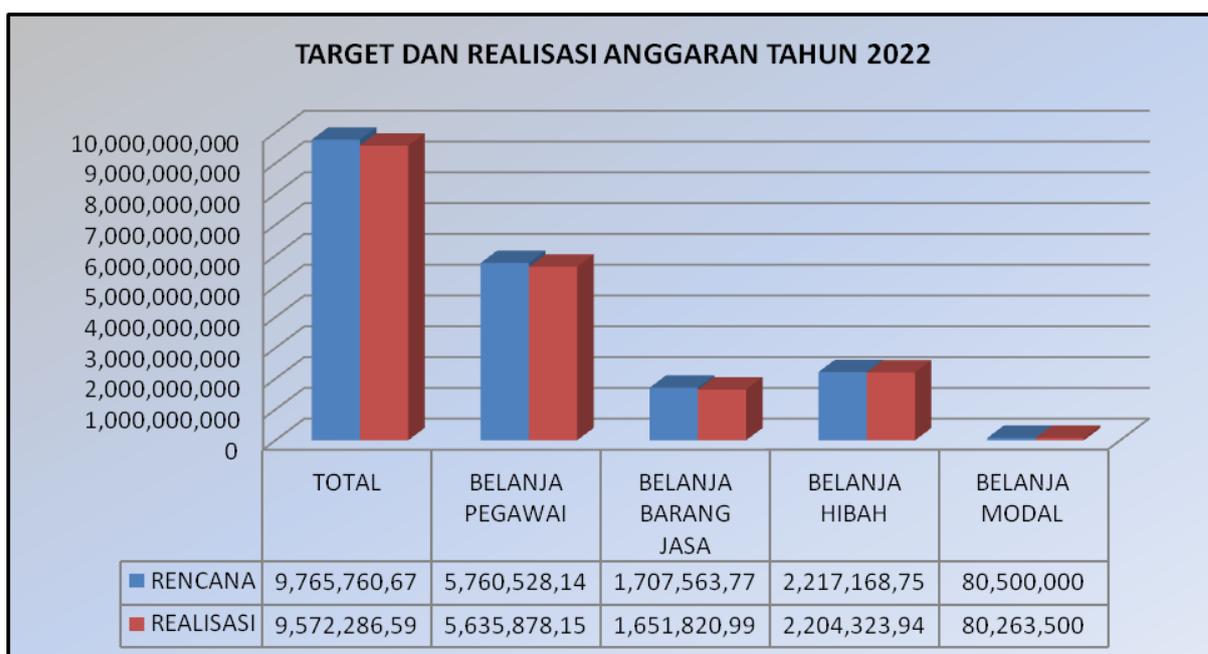
operasional penunjang sebesar Rp. 4.188.162.526,- (*empat milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*)

Realisasi belanja keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.572.286.594,- (*Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah*) atau 98,02%, Realisasi Gaji ASN adalah sebesar Rp. 5.457.708.158,- (*lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) atau sebesar 97,85%, hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun, pegawai yang pindah. Di dalamnya meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan jabatan Pegawai, tunjangan beras, serta tambahan penghasilan pegawai. Realisasi pembangunan dan operasional penunjang tahun 2022 sebesar Rp 4.006.083.436,- (*empat milyar enam juta delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*) atau 95,65%. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 telah berjalan dengan baik, namun terdapat sisa anggaran yang dihasilkan dari efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.15 *Target Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022*

No	Uraian	Pagu Anggaran			%
		Rencana	Realisasi	Sisa	
<b>A</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>9,765,760,673</b>	<b>9,572,286,594</b>	<b>193,474,079</b>	<b>98.02</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>9,765,760,673</b>	<b>9,572,286,594</b>	<b>193,474,079</b>	<b>98.02</b>
1	Belanja Pegawai	5,760,528,147	5,635,878,158	132,809,989	97.84
2	Belanja Barang Jasa	1,707,563,776	1,651,820,994	55,742,782	96.74
3	Belanja Hibah	2,217,168,750	2,204,323,942	12,844,808	99.42
4	Belanja Modal	80,500,000	80,263,500	236,500	99.71

Belanja Operasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 tidak dapat terealisasi 100% yang disebabkan adanya efisiensi belanja dan penyesuaian harga dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.



Gambar.3.9. Target dan Realisasi Anggaran 2022

Penyajian dan realisasi anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada laporan keuangan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk lebih rinci Realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel. 3.16 Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022*

Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
<b>3:27:01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,512,811,547</b>	<b>6,384,179,876</b>	<b>128,631,671</b>	<b>98.02</b>
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>110,424,000</b>	<b>108,631,000</b>	<b>1,793,000</b>	<b>98.38</b>
3.27.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,401,000	27,361,000	40,000	99.85
3.27.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16,642,000	16,642,500	0	100.00
3.27.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15,645,000	15,645,000	0	100.00
3.27.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,600,000	17,625,000	975,000	94.76
3.27.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,136,000	31,358,000	778,000	97.58
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,866,093,147</b>	<b>5,764,203,158</b>	<b>119,889,989</b>	<b>97.96</b>
3.27.01.202,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,577,598,147	5,457,708,158	119,889,989	97.85
3.27.01.202,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282,541,000	282,541,000	0	100.00
3.27.01.202,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,954,000	5,954,000	0	100.00
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>247,266,5000</b>	<b>243,808,862</b>	<b>3,457,638</b>	<b>98.60</b>
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,427,000	3,427,000	0	100.00

3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78,677,500	75,409,000	3,268,500	95.85
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,850,600	11,760,600	90,000	99.24
3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20,500,000	20,500,000	0	100.00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132,811,400	132,712,262	99,138	99.93
<b>3.27.01.208</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>217,107,900</b>	<b>213,616,856</b>	<b>3,491,044</b>	<b>98.39</b>
3.27.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	63,507,900	60,016,856	3,491,044	94.50
3.27.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153,600,000	153,600,000	0	100.00
<b>3.27.01.209</b>	<b>pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71,920,000</b>	<b>71,920,000</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
3.27.01.209.01	penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,440,000	66,440,000	0	100.00
3.27.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,480,000	5,480,000	0	100.00
<b>3:27:02</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>1,824,364,500</b>	<b>1,779,230,633</b>	<b>45,133,867</b>	<b>97.53</b>
<b>3.27.02.201</b>	<b>Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>434,384,500</b>	<b>397,579,828</b>	<b>36,804,672</b>	<b>91.53</b>
3.27.02.201.02	Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian	434,384,500	397,579,828	36,804,672	91.53
<b>3.27.02.202</b>	<b>Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>317,310,000</b>	<b>309,478,300</b>	<b>7,831,700</b>	<b>97.53</b>
3.27.02.202.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG hewan/Tanaman	190,080,000	182,486,800	7,593,200	96.01
3.27.02.202.02	Peningkatan kualitas SGD Hewan/Tanaman	127,230,000	126,991,500	238,500	99.81
<b>3.27.02.206</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,072,670,000</b>	<b>1,072,172,505</b>	<b>497,495</b>	<b>99.95</b>
3.27.02.206.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/kota lain	898,710,000	898,215,905	494,095	99.95
3.27.02.206.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/kota lain	173,960,000	173,956,600	3,400	100.00
<b>3:27:03</b>	<b>Program Penyediaan Dan pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>1,182,334,750</b>	<b>1,165,529,609</b>	<b>16,805,141</b>	<b>98.58</b>
<b>3.27.03.201</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>95,340,000</b>	<b>92,807,600</b>	<b>2,532,400</b>	<b>97.34</b>
3.27.03.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	95,340,000	95,340,000	2,532,400	97.34
<b>3.27.03.202</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>1,086,994,750</b>	<b>1,072,722,009</b>	<b>14,272,741</b>	<b>98.69</b>
3.27.03.202.03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	903,378,750	890,552,609	12,826,141	98.58
3.27.03.202.07	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	106,276,000	105,976,000	300,000	99.72
3.27.03.202.09	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana pertanian Lainnya	77,340,000	76,193,400	1,146,600	98.52
<b>3:27:04</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>223,632,376</b>	<b>221,332,976</b>	<b>2,299,400</b>	<b>98.97</b>
<b>3.27.04.201</b>	<b>Penjaminan Kesehatana Hewan, penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>223,632,376</b>	<b>221,332,976</b>	<b>2,299,400</b>	<b>98.97</b>
3.27.04.201.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	223,632,376	221,332,976	2,299,400	98.97
<b>3:27:06</b>	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>22,617,500</b>	<b>22,013,500</b>	<b>604,000</b>	<b>97.33</b>
<b>03.27.06.201</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>22,617,500</b>	<b>22,013,500</b>	<b>604,000</b>	<b>97.33</b>
3.27.06.201.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	22,617,500	22,617,500	604,000	97.33
<b>J U M L A H</b>		<b>9,765,760,673</b>	<b>9,572,286,594</b>	<b>193,474,079</b>	<b>98.02</b>

Dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perkebunan terdapat sisa anggaran yang berasal dari :

- Sisa kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Sisa belanja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Sisa belanja kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah.
- Sisa belanja kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah.

- Sisa belanja barang dan jasa atau hibah yang tidak dilaksanakan.
- dan Sisa kontrak pengadaan.

### 3.3. Penerimaan Pendapatan Dinas

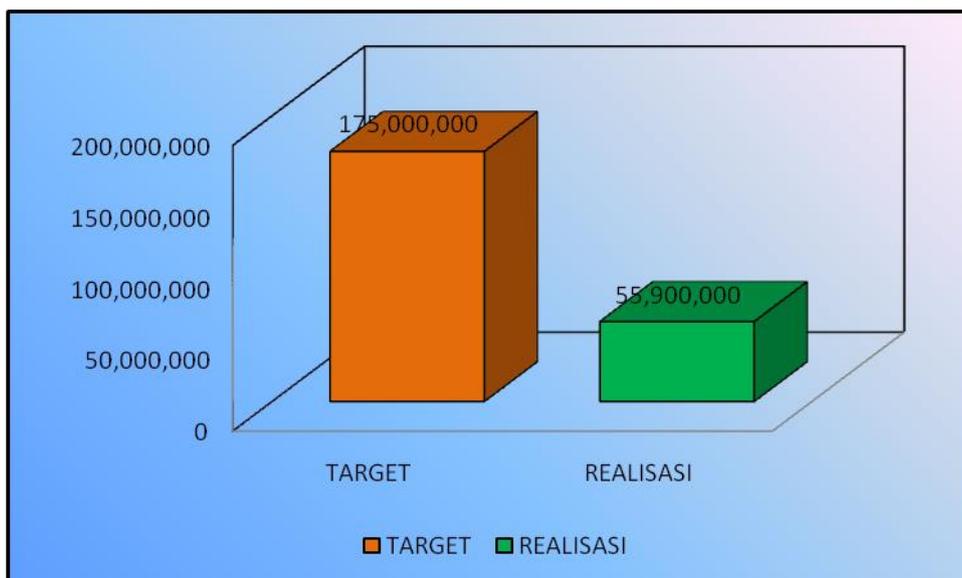
Penerimaan PAD dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022 target sebesar Rp. 175.000.000,- (*Seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dapat tercapai pada akhir bulan Desember 2022 sebesar Rp. 55.900.000,- (*lima puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah*) atau 31,94%.

Secara rinci target dan realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2022 tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.17. *Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022*

No. Rek	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/ (Kurang)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	175,000,000	55,000,000	31.94	-119,100,000
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	175,000,000	55,000,000	31.94	-119,100,000
4.1.04	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah</b>	175,000,000	55,900,000	31.94	-119,100,000
4.1.04.01	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	175,000,000	55,900,000	31.94	-119,100,000
4.1.04.01.05	<b>Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya</b>	175,000,000	55,900,000	31.94	-119,100,000
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	50,000,000	55,000,000	110.00	5,000,000
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	125,000,000	900,000	0.72	- 124,100,000

Dari data tersebut capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil penjualan ternak melebihi target yaitu sebesar 110%, sedangkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil penjualan tanaman jauh dibawah target yaitu sebesar 0,72%. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut :



Gambar.3.10. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022

Tidak tercapainya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Perkebunan pada sektor penjualan hasil tanaman dikarenakan terjadinya penjarahan buah sawit pada kebun pemerintah yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan oleh masyarakat sekitar kebun.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum dari lima sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 dengan capaian sangat baik dalam hal kinerja dan hal penggunaan dana juga sangat baik. Meskipun penggunaan dana kegiatan dan kinerja pegawai tidak sepenuhnya 100 persen, akan tetapi dari kegiatan yang dilakukan tersebut secara langsung telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Gambaran ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin untuk mewujudkan visi Merangin Mantap Bidang Pertanian dan Parawisata yaitu **Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”**

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Tahun Anggaran 2022, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, dengan cara:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur perencanaan.
2. Peningkatan teknologi informasi, metode dan sistem perencanaan pembangunan.
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendayagunaan kegiatan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat hasil.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan didasarkan pada data yang akurat, pemilihan yang cermat dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan

dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Kemudian, dilakukan pengawasan secara lebih optimal sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.

5. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, kepatutan dalam mengalokasikan anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan.
6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Merangin, instansi pemerintah yang lebih tinggi maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 yang lebih baik masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dengan harapan akan lebih baik pada masa mendatang.

Sebagai akhir kata, segenap pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

#### 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan usaha Peternakan dan Perkebunan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- 2) Memfasilitasi aksesibilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak dan petani kebun, baik melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Memberikan penyuluhan *good farming practice* secara berkala kepada para peternak dan petani kebun.

- 4) Mendatangkan ternak indukan dan bibit perkebunan yang berkualitas dan bersertifikasi.
- 5) Mengembangkan HMT ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil.